

---

**ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
DAN TANTANGANNYA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN  
PERTUMBUHAN BERKUALITAS**

Oleh :

**Salhefni**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta**

**Email: salhefnisuyoto@gmail.com**

**Kumba Digdowiseiso**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta**

---

**Article Info**

*Article History :*

*Received 26 - Jan- 2021*

*Accepted 19 - Feb - 2021*

*Available Online*

*28 - Feb- 2021*

**Abstract**

*The economic development of the Karawang Regency has reached an acceptable level, but in fact, it still faces some quite concerning problems, including poverty and income inequality. This study analyzed the performance of regional spending in the Karawang Regency and the relationship between several macroeconomic variables and the three fiscal policy functions. Besides, analyzing challenges in improving the Regional Revenue and Expenditures Budget (APBD) performance and alternative solutions to address these challenges. The analysis method used descriptive analysis by applying the data collection method based on a desk study. The results showed that the Karawang regency budget's performance in terms of the quality of regional spending showed a low performance. Based on the allocation and distribution functions, the APBD of the Karawang Regency was still not optimal in providing stimulus to the regional economy and resolving income and development inequalities. There were several challenges in improving the APBD performance of the Karawang Regency, including delays in budget disbursement, accumulation of transactions at the end of the year, understanding of budget preparation, and subjectivity in budget allocation. To solve problems related to budget disbursement governance, a credible budget system was required.*

---

*Keyword :*

*Fiscal policy,*

*macroeconomic*

*performance, budget*

*system reform*

---

**1. PENDAHULUAN**

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki perekonomian yang paling maju dibanding kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut dapat tercermin pada nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten tersebut mencapai Rp 163.745,56 miliar pada tahun 2019, di bawah Kabupaten Bekasi (Rp252.051,03 miliar) dan Kota Bandung (Rp197.642,71 miliar). Berdasarkan pendapatan perkapita, Kabupaten

Karawang memiliki PDRB perkapita pertahun mencapai Rp69.563.074,69, satu tingkat di bawah Kota Bandung sebesar Rp78.808.425,71 pada tahun yang sama (BPS, 2020a). Gambaran ini menunjukkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten ini telah mencapai taraf yang tinggi.

Namun demikian, kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karawang masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Jumlah penduduk miskin di

kabupaten ini pada tahun 2020 mencapai 195.410 orang atau 8,26% dari total penduduk secara keseluruhan (BPS, 2020b). Sementara itu, ketimpangan pendapatan di kabupaten ini cenderung mengalami peningkatan, dengan koefisien gini sebesar 0.34 pada tahun 2016 (BPS, 2020c).

Kenyataan tersebut memerlukan campur tangan pemerintah dalam menangani kedua permasalahan di atas. Instrumen yang dapat ditempuh pemerintah salah satunya melalui kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah. Terlebih sejak tahun 2001, penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, antara lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Digdowiseiso *et al.*, 2020). Penerapan kebijakan fiskal dilakukan melalui alokasi belanja daerah berdasarkan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (berkualitas), sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang ada. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, menganalisis kinerja belanja daerah Kabupaten Karawang serta hubungan beberapa variabel makroekonomi dengan ketiga fungsi kebijakan fiskal di atas. Kedua, menganalisis tantangan dalam meningkatkan kinerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) serta alternatif solusi untuk menangani tantangan tersebut.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Fungsi Kebijakan Fiskal

APBD adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal daerah dan sekaligus sebagai pedoman penganggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam ilmu keuangan negara, terdapat tiga fungsi kebijakan fiskal, yakni fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah fungsi kebijakan fiskal dalam penyediaan barang publik yang diharapkan dapat menghasilkan eksternalitas positif, melalui peningkatan kegiatan investasi, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Fungsi distribusi adalah fungsi kebijakan fiskal dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan, terutama melalui pajak dan subsidi, yang dapat memengaruhi keinginan masyarakat untuk bekerja dan berkonsumsi. Fungsi stabilisasi adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian (Rahardja dan Manurung, 2008; Falianty, 2019).

### Prinsip Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Adapun penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penganggaran organisasi sektor publik di mulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan (Mardiasmo, 2002).

Sebagai wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif), anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekadar masalah teknis, melainkan lebih merupakan alat politik (*political tool*). Karena pada dasarnya anggaran tidak hanya disusun berdasarkan ketentuan teknis ataupun melalui hitungan hitungan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu dokumen penganggaran disusun berdasarkan sebuah kesepakatan, dan merupakan sebuah terjemahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih (Hanida, 2010).

Menurut Ariany (2010), penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran, yakni transparan dan akuntabel, disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta keadilan anggaran. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Mengingat anggaran merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, APBD haruslah dapat memberikan informasi yang jelas dan tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan disiplin anggaran, penyusunan anggaran haruslah didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan tidak boleh meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Anggaran harus disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Menyangkut keadilan anggaran, alokasi anggaran haruslah dilakukan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk adil secara gender.

### Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Siregar dan Wahyuniarti (2007) menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemahaman ini dilatarbelakangi penelitian tersebut yang menyimpulkan bahwa relatif persistennya kemiskinan di wilayah perdesaan dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin di wilayah tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tercipta masih mengindikasikan laju pengangguran yang relatif tinggi dan lambat atau sulit untuk turun. Hal ini mengindikasikan terciptanya pertumbuhan ekonomi bersumber dari sektor-sektor yang cenderung padat modal.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menerapkan metode pengumpulan data berdasarkan *desk study*. Jenis data yang diperlukan menggunakan data sekunder, berupa data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta berbagai penelitian terkait. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan dan hasil penelusuran literatur lainnya.

Untuk mempertajam analisis, penelitian ini menerapkan analisis korelasi, yang bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan (korelasi) antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Adapun untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus Korelasi Pearson (*Product Moment*) sebagaimana disampaikan Sugiyono (2014), sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2) \cdot (N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

dimana,

n = Banyaknya pasangan data X dan Y

$\sum x$  = Total jumlah dari variabel X

$\sum y$  = Total jumlah dari variabel Y

$\sum x^2$  = Kuadrat dari total jumlah variabel X

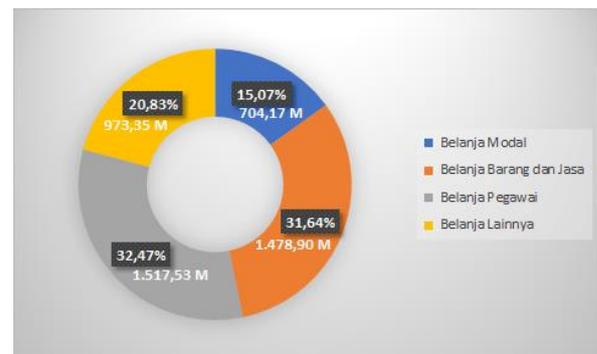
$\sum y^2$  = Kuadrat dari total jumlah variabel Y

$\sum xy$  = Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alokasi Belanja Daerah

Data BPS (berbagai edisi) menyampaikan total belanja APBD Kabupaten Karawang pada tahun 2019 mencapai Rp4.673,95 miliar, dengan alokasi terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp1.517,53 miliar (32,47%). Selanjutnya, diikuti alokasi untuk belanja barang dan jasa serta belanja lainnya, masing-masing Rp1.478,90 miliar (31,64%) dan Rp973,35 miliar (20,83%). Hal yang menjadi ironis bahwa alokasi belanja untuk pembangunan dalam bentuk belanja modal hanya mencapai Rp704,17 miliar (15,07%) (Gambar 1).



Sumber: BPS (Berbagai edisi)

Gambar 1. Alokasi belanja daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019

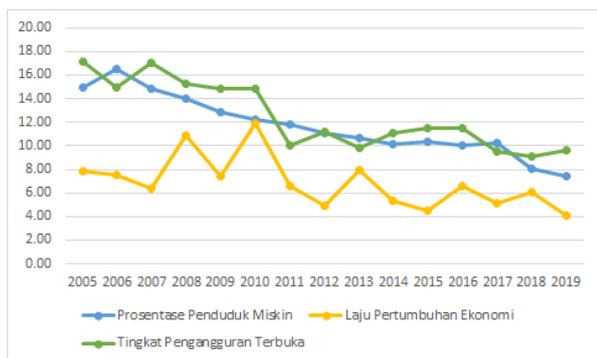
Kinerja APBD salah satunya dapat dilihat berdasarkan kualitas belanja daerah, melalui perhitungan rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin sedikit porsi belanja belanja pegawai, maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik dalam bentuk belanja modal. Alokasi belanja tersebut dapat membiayai pembangunan fasilitas masyarakat, dan atau mendukung belanja yang efektif untuk mendorong roda perekonomian daerah. Berdasarkan data di atas, alokasi belanja pegawai dominan dalam postur APBD Kabupaten Karawang, sebaliknya alokasi belanja modal memiliki proporsi paling kecil. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa kinerja kualitas belanja dalam APBD Kabupaten Karawang masih rendah. Sementara itu, rasio belanja barang dan jasa tidak berbeda jauh dengan belanja pegawai. Pemerintah Kabupaten Karawang harus mengaktifkan alokasi jenis belanja ini untuk mendukung alokasi belanja modal yang lebih produktif. Penghematan dapat dilakukan melalui pengetatan pembelian barang habis pakai dan perjalanan dinas aparatur. Secara umum, fungsi alokasi kebijakan fiskal yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Karawang

masih belum optimal dalam memberikan stimulus pada perekonomian daerah.

### Pencapaian Pertumbuhan Berkualitas

Berdasarkan analisis uji korelasi menunjukkan hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,52. Nilai tersebut menginformasikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif atau searah, dengan tingkat korelasi yang moderat atau tidak begitu kuat. Dengan kata lain, tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang, tidak terlalu berdampak pada perubahan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, hasil uji korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka memberikan nilai koefisien sebesar 0,56. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut juga memiliki hubungan yang positif atau searah, dengan tingkat korelasi yang moderat atau tidak begitu kuat. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang, juga tidak terlalu berdampak pada perubahan tingkat pengangguran terbuka (Gambar 2).



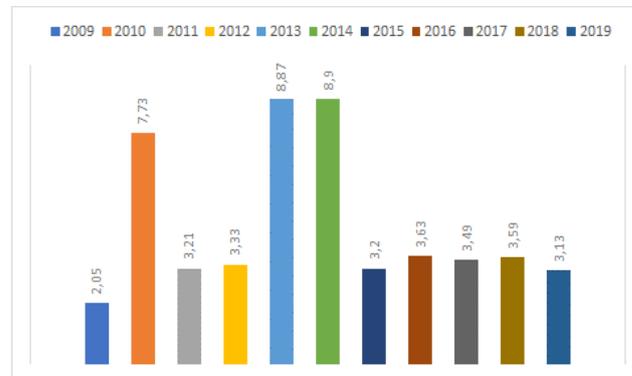
Sumber: BPS, berbagai edisi

Gambar 2. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang periode 2005-2019

Hasil ini memberikan indikasi bahwa diduga pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum memberikan pertumbuhan berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah menciptakan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat serta ketimpangan antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan/nonpesisir dengan wilayah pelosok/pedesaan/pesisir. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang cenderung hanya dinikmati oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Interpretasi tersebut dapat dihubungkan dengan

keberadaan sektor industri pengolahan yang memberi sumbangan terbesar pada PDRB, yang mayoritas berlokasi di wilayah perkotaan. Berdasarkan data BPS (Berbagai edisi), PDRB Kabupaten Karawang bersumber dari sektor industri pengolahan sebesar 70,72% pada tahun 2019.

Ketimpangan pendapatan dan wilayah juga terkait dengan penyerapan tenaga kerja, mengingat lapangan kerja yang diciptakan khususnya oleh sektor industri pengolahan, banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi tersebut dapat mengurangi serapan tenaga kerja lokal Kabupaten Karawang, sehingga tingkat pengangguran terbuka sulit untuk turun. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi pekerja dari luar daerah adalah rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Kabupaten Karawang. Berdasarkan data BPS (Berbagai edisi), mayoritas penduduk Kabupaten Karawang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan tidak tamat dan atau tamat sekolah dasar pada tahun 2019 (37,42%). Sementara itu, sebagian besar lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor industri pengolahan yang cenderung padat modal, banyak membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi trampil.



Sumber: BPS, berbagai edisi

Gambar 3. Laju inflasi Kabupaten Karawang periode 2009-2019

Uraian di atas mengindikasikan fungsi distribusi kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui pertumbuhan ekonomi masih belum optimal dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Sementara itu, fungsi stabilisasi kebijakan fiskal cukup memberikan hasil yang optimal, walaupun masih perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian serius. Hal tersebut tercermin salah satunya laju inflasi yang cukup terkelola dengan baik, atas koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Bank

Indonesia (Gambar 3). Inflasi yang rendah dan stabil memberikan situasi yang kondusif bagi keseimbangan perekonomian makro kabupaten ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Tantangan Peningkatan Kinerja APBD**

Pada umumnya penyerapan belanja daerah, khususnya belanja modal, terjadi penumpukan di triwulan keempat (Oktober sampai dengan Desember). Hal ini berakibat pada tidak optimalnya peran anggaran pemerintah daerah dalam memberikan stimulus pada perekonomian. Anggaran yang mengalir hanya berdampak pada pertumbuhan PDRB pada rentang bulan tersebut.

Triaswati (2011) menyatakan bahwa keterlambatan pencairan anggaran terjadi karena proses pencairan yang panjang. Keterlambatan pencairan anggaran dianggap hal biasa oleh aparat pemerintah yang berwenang menanganinya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak memadainya sistem insentif dan disinsentif secara formal bagi aparat yang berwenang menangani pencairan anggaran.

Selain itu, desain anggaran dalam APBD mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas belum memiliki pemahaman yang memadai. Perencana kebijakan pembangunan dan anggaran seringkali masih memiliki pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi lebih penting atau menjadi prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pemerataan. Padahal, kebijakan pembangunan yang baik memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan. Akibatnya terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Di sisi lain, perekonomian di wilayah perdesaan masih tetap tertinggal. Apabila desain pembangunan daerah dilaksanakan secara sekaligus antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat perdesaan, yang selanjutnya akan mempercepat roda perekonomian daerah.

Anggaran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kerap kali masih dialokasikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Oleh karena pengelolaan anggaran merupakan bagian dari politik, maka implementasi atau realisasi anggaran pada umumnya sarat dengan kepentingan politik. Dengan kata lain, kepentingan politik menentukan realisasi anggaran. Banyak program-program besar pemerintah daerah tidak dapat direalisasikan karena dihambat oleh kepentingan politik dari *stakeholder* lain (Rindawati dan Marjoyo, 2017).

### **Rekomendasi Perbaikan Sistem Penganggaran**

Berdasarkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja APBD, penelitian ini menekankan pada rendahnya penyerapan anggaran, yang kerap kali dihadapi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Karawang. Masalah rendahnya penyerapan anggaran daerah yang sering terjadi salah satunya disebabkan oleh masalah keterlambatan pencairan anggaran. Triaswati (2011) menyarankan perlunya memberikan prioritas penyelesaian masalah tersebut melalui pembangunan sistem anggaran yang kredibel. Hal tersebut dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi di bidang anggaran. Misalnya, pemberian insentif dan disinsentif bagi aparat pemerintah yang membidangi anggaran. Apabila mereka dapat mencairkan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran, maka kinerja aparat tersebut dianggap memadai. Beberapa insentif yang dapat diberikan antara lain berupa tunjangan reformasi birokrasi, bonus atau percepatan kenaikan pangkat.

Lebih lanjut Triaswati (2011) menyampaikan bahwa untuk menunjang dan mempercepat penyempurnaan sistem anggaran, diperlukan beberapa upaya. *Pertama*, memotong tata cara perizinan dan pencairan anggaran, agar kedua proses tersebut dapat ditempuh secara lebih efisien dan singkat. *Kedua*, membangun sistem perizinan dan sistem informasi anggaran dengan menggunakan teknologi informasi yang bersifat daring, agar kedua proses tersebut dapat berjalan secara transparan dan menghindari "*pertemuan*" ke dua belah pihak, sekaligus mengurangi biaya transaksi. *Ketiga*, membangun kerja sama dengan lembaga keuangan bank, agar petugas yang mencairkan uang dan petugas yang menerima uang dapat memantau proses dan kecepatan pencairan anggaran secara transparan, tercatat dalam sistem dan konsisten.

## **5. KESIMPULAN**

Kinerja APBD Kabupaten Karawang yang ditinjau dari kualitas belanja daerah menunjukkan kinerja yang masih rendah. Dengan kata lain, fungsi alokasi kebijakan fiskal yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Karawang masih belum optimal dalam memberikan stimulus pada perekonomian daerah. Begitu pula berdasarkan fungsi distribusi, kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui pertumbuhan ekonomi masih belum optimal dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Sebaliknya, fungsi stabilisasi telah memberikan hasil yang cukup optimal, yang tercermin salah satunya melalui perkembangan laju inflasi yang cukup terkelola dengan baik.

Terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan kinerja APBD Kabupaten Karawang, antara lain keterlambatan pencairan anggaran, penumpukan transaksi di akhir tahun, pemahaman dalam penyusunan anggaran dan subyektivitas dalam pengalokasian anggaran. Untuk menjawab masalah terkait tata kelola pencairan anggaran diperlukan pembangunan sistem anggaran yang kredibel.

## 6. REFERENSI

- Ariany, L. 2010. Pembangunan ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12(1): 20-32.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2020a. Produk Domestik Regional Bruto. Karawang: BPS Kabupaten Karawang.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2020b. Kemiskinan. Karawang: BPS Kabupaten Karawang.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2020c. Kemiskinan. Bandung: BPS Kota Bandung.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. Berbagai edisi. Kabupaten Karawang Dalam Angka. Karawang: BPS Kabupaten Karawang.
- Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., Setiawan, H.D., 2020. Fiscal Decentralisation and Inequality in Indonesia. *Journal Экономика региона* 16(3): 989-1002.
- Falianty, T.A. 2019. *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Hanida, R.P. 2010. Dinamika penyusunan anggaran daerah: Kasus proses penetapan program dan alokasi anggaran belanja daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Politik* 7(1): 71-85.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugrahawati, Z. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 di SKPD Kabupaten Tuban: Studi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 4(10): 1-11.
- Putera, R.E., 2016. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. *Sosiohumaniora* 18(3): 261-269.
- Rahardja P., dan Manurung, M. 2008. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rindawati, S., & Marjoyo. 2017. Responsibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. *Sosiohumaniora* 19(2): 121-128.
- Setiawan, D. & Rizkiah, F. 2017. Political budget cycles in municipalities: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society* 18(3): 533-546.
- Siregar, H., dan Wahyuniarti, D. 2007. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. IPB dan Brighten Institute. Tersedia pada: [http://pustaka.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/06/dampak-ptbmbhn-ek\\_hermanto.pdf](http://pustaka.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/06/dampak-ptbmbhn-ek_hermanto.pdf). Diakses pada 20 Januari 2021 pukul 15.51 WIB.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Triaswati, N. 2011. Kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat: Pembangunan berkeadilan dan peningkatan daya saing. Di dalam: *Essay Pemikiran/Badan Otonom Economica FEUI*. Aulianisa, L., editor. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.